

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Cekli Setya Pratiwi, dkk, 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

I Made Winartha, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta.

Lumentut, P. N, 2015, *Penerapan Asas Freies Ermessen Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Mengeluarkan Kebijakan*. Lex Administratum, 2015, RajaGrafindo, Jakarta.

Marpaung, L, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ridwan, H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung.

S.F. Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Safri Nugroho, 2007, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Setiady, T. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta, Bandung.

SF Marbun, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Libery, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soejono Dirjosisworo, 1984, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi Pemasyarakatan*, Bandung armico hlm 199 – 200.

Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Bandung.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lumentut, P. N. 2015. *Penerapan Asas Freies Ermessen Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Mengeluarkan Kebijakan*. Lex Administratum, hlm 3

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan.

## **C. Jurnal**

Martins, L. D. J. 2015. *Kebijakan Pelayanan Kepada Narapidana dan Tahanan di Lembaga Perasyarakatan Gleno Municipio Ermera Timor Leste*. Jurnal Reformasi, hlm 2-5.

Lenvine, C.H, 1990, *Public Administration Obalinges, Obvies, Consequences, Liones Scatt Foremen*, Jurnal unpas hlm 50-77.

#### D. Internet

Indonesia Corruption Watch, Antikorupsi.org., *Korupsi di Penjara*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-di-penjara> pada tanggal 28 juli 2024, pukul 16.30 WIB.

